Kewarganegaraan

**Ruang Lingkup PPKN sebagai Orientasi**

* Indonesia memiliki 262 Juta penduduk, > 500 grup etnik, 17.000 pulau
* keanekaragaman budaya dan kekayaan alami
* Bagian terluar Indonesia

Timur : Merauke

Selatan : Pulau Rote

Barat : Sabang

Utara : Pulau Miangas

* Tantangan kehidupan kebang- saan indonesia saat ini

1. Globalisasi dengan modernisasi di segala bidang berimplikasi pada melemahnya kehidupan kebang- saan kita
2. Menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat gotong- royong, menguatnya ikatan- ikatan primordial, merajalelanya tindakan kekerasan, dll
3. Bahaya manusia Indonesia menjadi manusia “marginal dan individualis”

* Latar belakang pentingnya pendidikan kewarganegaraan:

- Hadirnya era (paradoks) globalisasi;

1. Dunia tanpa batas
2. Menguat dan melemahnya identitas kebangsaan

- Krisis Kebangsaan dan identitas nasional

- Kebanggaan sebagai warga negara Indonesia

* Latar belakang PPKn saat ini
* UU NO 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 (2) menyebutkan bahwa pendidikan tinggi wajib memuat: 1) Pendidikan Agama

1. Pendidikan Kewarganegaraan&
2. Bahasa (revisi UU No 2/1989)

* Era Reformasi

dari ‘otoritarian’ (Pendidikan Kewiraan) ke demokratisasi (Pendidikan Kewarganegaraan). Alasannya:

1. Pola pembelajaran bersifat indoktrinatif dan monolitik,
2. Muatan materinya sarat kepentingan ideologi rezim

* Paradigma PPKn

- Paradigma feodalistik

1) mahasiswa sebagai objek;

2) monolitik;

3) doktriner;

4) sentralistik dan antidialog.

- Paradigma humanistik

1) mahasiswa sebagai subjek: memiliki potensi dan karakteristik;

2) dialogis;

3) Orientasi pembelajaran menekankan *learning to know, learning to be, learning to do* dan *learning to live together*

* Urgensi PPKn

1. Lahirnya era demokratisasi
2. Proses transisi demokrasi Indonesia yang melalui:
3. reformasi konstitusional
4. reformasi kelembagaan,
5. pengembangan kultur dan budaya politik
6. Kemunculan ideologi transnasional
7. Krisis kebangsaan sebagai akibat dari krisis kepemimpinan

* Istilah dan definisi
* *Civics*

*-* Henry Randall Waite dalam *The Citizen and Civics* merumuskan bahwa Civics adalah ilmu kewar- ganegaraan yang membicaran hubungan manusia (sebagai individu) dengan

1. manusia dalam perkumpulan yang terorganisasi
2. dengan negara

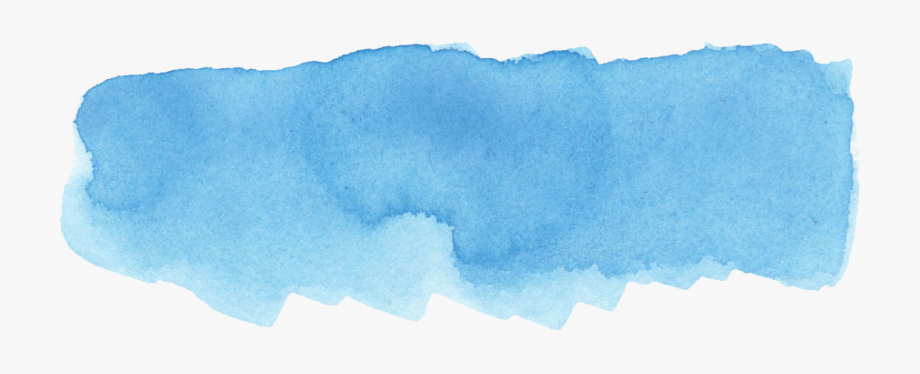
* *Civic Education*

- Pendidikan yang mencakup pemahaman dasar tentang

1. Cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya,
2. *Rule of law*
3. HAM
4. Partisipasi demokrasi
5. Pengembangan budaya demo- krasi dan perdamaian.

- Secara substantif:

1. mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya
2. membangun kesiapan warga negara sebagai warga dunia (global society)

**Identitas Nasional**

* Pengertian Identitas nasional

- Identitas → *identity* (B.Ingg) → ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesu- atu sehingga membedakan dengan yang lain

- Nasional → *nation* (B.Ingg) → bangsa, negara, rakyat.

Kata “nasional” merujuk pada konsep kebangsaan.

Nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dsb

- Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya (Wibisono Koento:2005)

* Indikator Identitas Nasional

1. **Pola perilaku** adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Lambang-lambang**, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara.
3. **Alat-alat perlengkapan**, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan (berupa bangunan, peralatan dan teknologi).
4. **Tujuan yang ingin dicapai** yang bersifat dinamis dan tidak tetap.

* Bentuk-Bentuk Identitas Nasional

- Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 35, 36A, 36 B, dan 36 C. Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

- Menurut Winarno (2013)

1. Bahasa Nasional atau bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia
2. Bendera Negara adalah Sang Merah Putih
3. Lagu Kebangsaan adalah Lagu Indonesia Raya
4. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila
5. Semboyan Negara adalah Bhinneka Tunggal Ika
6. Dasar Falsafah Negara adalah Pancasila
7. Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945
8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Konsepsi Wawasan Nusantara
10. Kebudayaan Daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional.

* Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia

1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari
3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar
4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia
5. Menyukai simbol-simbol asing daripada simbol bangsa sendiri dan lebih mengapresiasi lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri.

* Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Indonesia

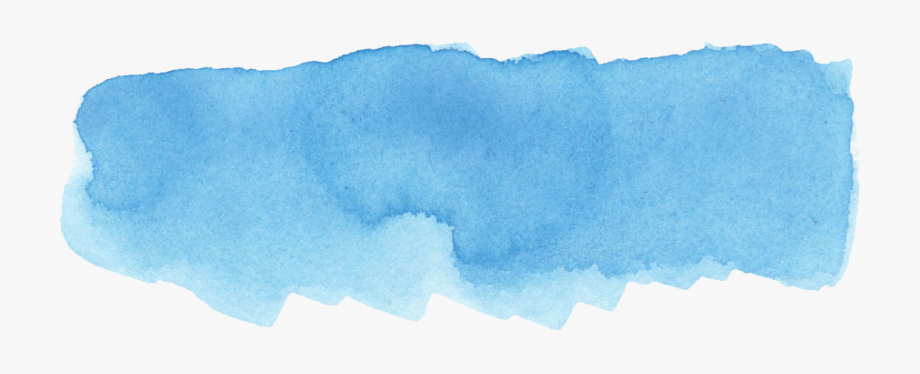
1. Bangsa Indonesia dapat dibedakan sekaligus dikenal oleh bangsa lain.
2. Identitas Nasional bagi sebuah negara-bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara-bangsa.
3. Identitas Nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa.

* Jati Diri Bangsa Indonesia

Proklamasi:

* titik kulminasi perjuangan Bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajah
* Deklarasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh Dunia.

Jati diri Bangsa disusun atas dasar dorongan kehendak yang baik, terbuka, jujur dan iklhlas dalam upaya memperkokoh eksistensi NKRI (Negara Kesaruan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila.  
 Kedudukan pancasila:  
1. Sebagai dasar Negara RI  
2. Roh dan Sumber dari Jati diri Bangsa Indonesia

**Negara dan Konstitusi**

* Pengertian Negara

- Kata “negara” berasal dari kata *staat* (Belanda dan Jerman), *State* (Inggris), *Etat* (Perancis) artinya “meletakkan keadaan berdiri” atau “membuat berdiri”

- Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.

* Unsur-Unsur Negara

**- Rakyat**

Penduduk yang berdiam di wilayah sebuah Negara dan tunduk pada atuan yang telah disepakati bersama dan mendukung negara untuk menjadi maju dan sejahtera.

**- Wilayah**

Teritorial yang menjadi kekuasaan negara dan menjadi tempat bermukimnya bagi rakyat sebuah negara. [darat, laut dan udara]

**- Pemerintah yang berdaulat**

Bagan organisasi yang bertugas atas nama negara dan melaksanakan kekuasaan negara. Berkewajiban untuk merancang dan mengambil keputusan- keputusan untuk semua warga negara di dalam kepemim- pinannya/kekuasaannya.

**- Pengakuan dari negara lain**

* Tujuan Negara

1. Menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan- keinginannya secara maksimal.
2. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
3. Mencapai penghidupan dan kehi- dupan yang aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan.
4. Mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan keten- teraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama.
5. Memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia.

* Fungsi Negara

1. **Fungsi pengaturan dan ketertiban**

Mencegah bentrokan-bentrokan yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara.

1. **Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan**

Negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.

Negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil.

1. **Fungsi pertahanan dan keamanan**

Untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar.

Negara wajib nampu melindungi rakyatnya, wilayah dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

1. **Fungsi keadilan**

Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah di kontribusikan kepada bangsa dan negara.

Fungsi ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum

* Sifat Negara

1. **Mengharuskan**

Memiliki kekuasaan untuk meng- gunakan kekerasan fisik secara legal. Dalam hal ini hanyalah polisi dan tentara yang memang di bidang pertahanan dan keamanan.

1. **Monopoli**

Monopoli dalam menyatakan tujuan bersama warga masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat memutuskan bahwasannya suatu keberpihakan atau aliran politik tertentu tidak dapat ada dan dipublikasikan dikarenakan berlawanan dengan apa yang sudah menjadi tujuan dari masyarakat.

1. **Mencakup semua**

Keseluruhan tata tertib dan perundang-undangan di sebuah negara berlaku atas semua orang tanpa pandang ras ataupun agama

* Asal Mula Terjadinya Negara

**SECARA FAKTUAL**

1. Occupatie (Pendudukan)

Suatu wilayah yang tidak bertuan dan tidak dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku, kelompok tertentu.

1. Fusi (Peleburan)

Fusi merupakan gabungan dua negara atau lebih. Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru.

1. Cessie (Penyerahan)

Suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu.

1. Accsie (Penaikan)

Suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut atau delta. Kemudian wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara.

1. Anexatie (Pencaplokan)

Suatu bangsa berdiri disuatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti.

1. Proclamation (Proklamasi)

Hal ini terjadi karena ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan (Perlawanan) sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali, dan menyatakan kemerdekaannya.

1. Inovation (Pembentukan baru)

Munculnya suatu negara baru diatas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal yang kemudian lenyap.

1. Separatische (Pemisahan)

Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian mengatakan kemerdekaannya.

**SECARA TEORITIS**

1. Teori ketuhanan

Beranggapan bahwa terbentuknya negara atas dasar kehendak Tuhan. Tanpa adanya kehendak Tuhan segala sesuatu tidak mungkin terjadi. Teori ketuhanan berdasarkan pada determinisme religius, yaitu segala sesuatunya sudah ditakdirkan Tuhan. Hal ini tampak dari kalimat by the grace of God (berkat rahmat Tuhan) di berbagai UUD negara.

1. Teori perjanjian

Beranggapan bahwa negara terbentuk berdasarkan perjanjian bersama/ masyarakat.

1. Teori kekuasaan

Beranggapan bahwa negara terbentuk atas dasar kekuasaan dan kekuasaan adalah ciptaan orang yang paling kuat dan berkuasa.

1. Teori hukum alam

Menurut hukum alam, terjadinya negara karena kekuasaan alam dan berlakunya abadi serta universal, berlaku setiap waktu.

* Pertumbuhan Negara
  + **SECARA PRIMER**

1. Fase kelompok/suku (*Genootschaf*)

Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkem- bang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu/suku.

2. Fase Kerajaan (*Rijk*)

Kepala suku yang semula berkuasa dimasyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi dengan menaklukan negara lain. Hal ini mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku dari primus interparest menjadi seorang raja.

3. Fase Negara Nasional (*Staat*)

Pada fase ini kesadaran bernegara masyarakat telah muncul. Akan tetapi, raja yang memerintah menjalankan kekuasaannya secara absolute dengan sistem pemerintahan terpusat ditangan raja.

1. Fase Demokrasi (*Democratishe Natie*)

Fase ini terbentuk atas dasar kesadaran akan adanya kedaulatan ditangan rakyat.

5. Fase Diktator (*Dictatuur*)

Pada fase ini, pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara demokratis berubah menjadi pemerintahan yang diktator.

* + **SECARA SEKUNDER**

Revolusi, Intervensi, dan Penaklukan

* Pengertian Konstitusi

- Berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Constitution*” dan berasal dari Bahasa Belanda “*constitue*” dan dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – Undang Dasar.

- Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

* Tujuan Konstitusi

1. **Membatasi kekuasaan penguasa;** agar tidak bertindak sewenang – wenang dan merugikan rakyat
2. **Melindungi HAM;** setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
3. **Pedoman penyelenggaraan negara;** tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

* Fungsi Konstitusi

1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang
2. Memberi suatu rangka dasar bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan
3. Dijadikan landasan penyeleng- garaan negara menurut suatu system ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya
4. Menjamin hak asasi warga negara

* Macam-Macam Konstitusi
* Fleksibel

Konstitusi tersebut apabila ingin diubah sewaktu-waktu, dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan yang sama dengan mekanismepengubahan undang- undang biasa.

Contoh: melalui pemungutan suara terbanyak yang mutlak

* Rigid

Konstitusi yang apabila ingin diubah sewaktu-waktu harus melalui mekanisme tersendiri.

Contoh: UUD 1945

* Hal yang Dimuat dalam Konstitusi

- Memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara

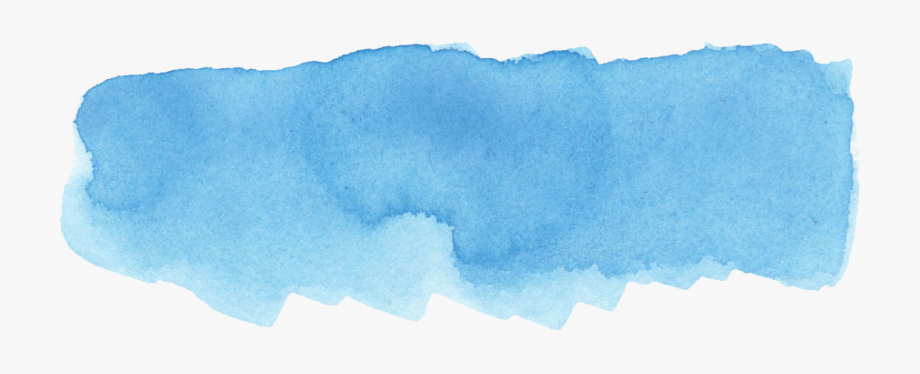
- Organisasi Negara

- Prosedur mengubah UUD

- Hak asasi manusia

* Dinamika Konstitusi di Indonesia

Pada saat era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggaraan Negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN.

**Demokrasi Indonesia**

* Pengertian Demokrasi

- Demos → Rakyat

- kratos/kratein → kekuasaan

- Demokrasi → Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat

- Demokrasi sbg dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok bernegara (Noer,1983;207)

* Sejarah Demokrasi

1. Konsep Demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani Kuno (4SM – 6M ) dapat berjalan baik, negara kecil dg penduduk 300.000 orang
2. Mulai hilang ketika memasuki abad pertengaha (600 -1400) karen struktur sosial yg feodal, kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh Paus dan pemuka agama, kehidupan politik ditandai perebutan kekuasaan oleh para bangsawan
3. Tetapi pada abad pertengahan ini pula lahir suatu dokumen ***Magna Charta*** *(*Piagam Besar*)* yaitu suatu piagam yg berisi perjanjian antara Raja John dari Inggris dgn para Bangsawan bahwa raja mengakui beberapa hak dan previleges terhadap para bangsawan sbg imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dll, sehingga pada masa ini terdapat dua keputusan penting bahwa kekuasaan raja harus dibatasi dan HAM lebih penting drpd kedaulatan raja (Randlomaning,1983)
4. Renaissance dan reformasi gereja mendorong eropa masuk ke dalam *aufklarung* (abad pemikiran) dan rasionalisme yg mendorong kebebasan berfikir, sehingga timbul hak-hak politik rakyat yg tidak boleh diselewengkan oleh raja
5. Salah satunya adalah **Montesquieu** (1689-1955) yang mengemukakan sistem yang menjamin hak-hak politik rakyat kekuasaan haruslah dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang masing-masing berdiri sendiri dan memiliki kekuasaan yang setara, sistem ini dikenal dengan **Trias Politica**

* Bentuk-Bentuk Demokrasi

- Menurut Torres

1. Formal Democracy

Menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara.

- Sistem presidensiil

Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden.

- Sistem parlementer

Kepala eksekutif adalah berada di tanganseorang perdana menteri. Adapun kepala negara adalah berada pada seorang ratu/presiden

1. Substantive Democracy

Demokrasi yang memberikan peluang bagi seluruh anggota masyarakat dari selurluh golongan, untuk menempatkan kepentingan maupun kebutuhan mereka sebagai bagian dari agenda politik resmi di negara yang mereka tinggali.

Hal ini bermakna bahwa demokrasi substantif benar-benar mengaplikasikan jiwa sesungguhnya dari demokrasi

- Berdasarkan Filosofi

1. Demokrasi Perwakilan Liberal

Suatu pembaruan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Namun demikian perlu disadari bahwa dalam prinsip demokrasi ini apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan suatu manifestasi perlindungan serta jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara.

Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekoomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam.

1. Demokrasi Satu partai dan Komunisme

Marx mengembangkan pemikiran sistem demokrasi “commune structure” (struktur persekutuan). Menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas yang paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri, yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar misalnya distrik atau kota. Unit-unit administrative yang lebih besar ini kemudian akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional. Susunan ini sering dikenal dengan struktur “piramida” dari “demokrasi delegatif”

* Perkembangan Demokrasi di Indonesia
* 1945-1959 parlementer
* 1959-1965 terpimpin
* 1966-1998 pancasila era Orba
* 1999-sekarang pancasila era reformasi
* Demokrasi Pancasila
* Hakikat Demokrasi Pancasila

Demokrasi menurut bangsa indonesia adalah kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat

* Arti Demokrasi Pancasila

1. Demokrasi atau kedaulatan rakyat yg didasari dan dijiwai oleh segenap sila pancasila secara integratif
2. Demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan kegotongroyongan ditu- jukan kepada kesejahteraan rakyat.
3. Dalam demokrasi pancasila sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat
4. Dalam demokrasi pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak
5. Dalam demokrasi pancasila keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dg cita-cita hidup bangsa indonesia yg dijiwai oleh semangat kekeluargaan

* Ciri Demokrasi Pancasila

- Kedaulatan berada di tangan rakyat

- Dianut paham kenegaraan integralistik

- Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

- Tidak mengenal partai pemerintah dan partai oposisi

- Diakui keselarasan antara hak & kewajiban

- Menghormati hak asasi manusia

- Ketidak setujuan terhadap kebijakan pemerintah disampaikan kepada wakil-wakil rakyat

- Tidak menganut sistem satu partai

- Pemilu dilakukan secara luber

- Menganut sistem masa mengambang

- Tidak mengenal diktaktor mayoritas dan tirani minoritas

- Prinsip mendahulukan kepentingan rakyat

* Aspek-Aspek Demokrasi Pancasila

A. Aspek formal

Cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya secara bebas, bertanggung jawab, terbuka dan jujur

B. Aspek material

Mengakui harkat & martabat manusia serta menjamin bagi perwujudannya. (masalah politik, ekonomi, sosial budaya)

C. Aspek normatif

Mengungkapkan seperangkat norma sebagai aturan permainan dalam penyelenggaraan negara

D. Aspek optatif (tujuan)

Tujuan dan keinginan yg hendak dicapai

E. Aspek organisasi

Organisasi sebagai wadah pelak-sanaan demokrasi baik supra maupun infra struktur)

F. Aspek kejiwaan

Mengandung unsur semangat

* Pokok-Pokok Demokrasi Pancasila

1. Untuk kepentingan umum atau respublica

2. Kekuasaan tertingginya pada rakyat/ kedaulatan rakyat.

3. Menggunakan lembaga perwakilan rakyat

4. Berdasarkan hukum.

5. Pemerintah, berdasarkan konstitusi.

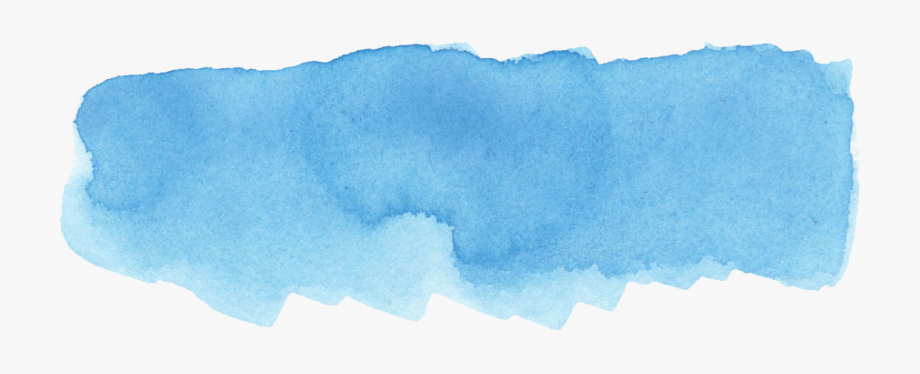
6. Kepala negara, atas nama rakyat  mandataris rakyat.

7. Mengakui hak dan kewajiban kemanusiaan/ hak azasi.

8. Memiliki kelembagaan & pengaturan wila-yah negara (departemen dan otonomi).

9. Demokrasi bukan tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan (tujuan nasional)

10. Memiliki tata cara untuk melindungi dari ragam demokrasi lain yg tidak sesuai.

**Pendidikan Anti Korupsi**

* Pengertian Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, dari segi materiil perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

* Faktor Penyebab Korupsi
* Sistem Penyelenggaraan negara yang keliru
* Kompensasi Pegawai yang rendah
* Pejabat yang serakah
* Law Enforcement Tidak berjalan
* Hukum yang ringan terhadap koruptor
* Pengawasan yang tidak efektif
* Budaya masyarakat yang kondusif KKN
* Bentuk-Bentuk Korupsi

- Kerugian keuangan negara

- Suap menyuap

- Penggelapan dalam jabatan

- Pemerasan

- Perbuatan curang

- Benturan kepentingan dalam pengadaan

- Gratifikasi

* Sembilan Nilai Antikorupsi

1. Kejujuran
2. Kepedulian
3. Kemandirian
4. Kerja keras
5. Tanggung jawab
6. Kedisiplinan
7. Keberanian
8. Sederhana
9. Keadilan

* Prinsip Antikorupsi

1. Akuntabilitas

Kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja

2. Transparasi

Pemberantasan korupsi dimulai dari transparasi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka

3. Kewajaran

Prinsip ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam kegiatan penganggaran dana

4. Kebijakan  
 kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat  
5. Kontrol Kebijakan  
 prinsip ini merupakan upaya agar pelaksanaan upaya kebijakn sesuai dengan standar yang ada dalam lembaga pembuat kebijakan

* Strategi Pendidikan Antikorupsi dalam Upaya Memperbaiki Karakter Bangsa Indonesia

- Represif: jika ada pejabat yang ketahuan melakukan korupsi, maka hal itu akan langsung ditangani dan diselesaikan melalui badan penegak hukum baik kepolisian maupun KPK.

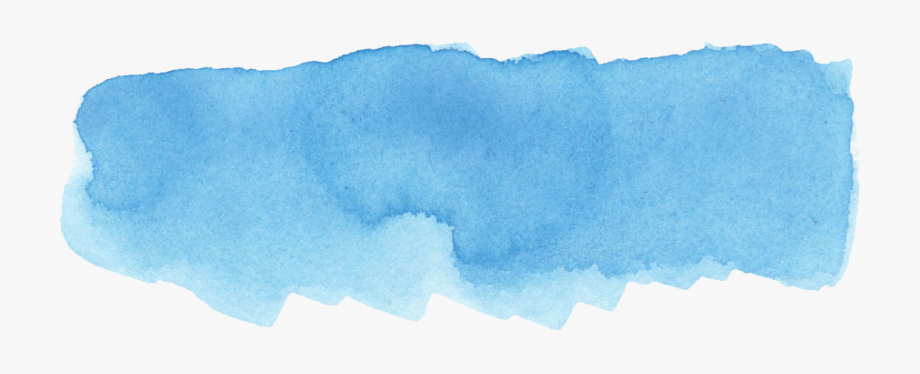
- Preventif: diadakannya “pendi- dikan anti korupsi” yang didasari oleh kerjasama antara KPK dengan lembaga pendidikan Indonesia.

* Tujuan Pendidikan Antikorupsi

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai korupsi
2. Dapat dijadikan bekal agar kelak tidak melakukan tindak korupsi karena dapat merugikan orang lain
3. Membentuk Manusia Indonesia yang Bermoral
4. Membentuk Manusia Indonesia yang Cerdas dan Rasional
5. Membentuk Manusia Indonesia yang Inovatif dan Suka Bekerja Keras
6. Membentuk Manusia Indonesia yang Optimis dan Percaya Diri

* Dampak korupsi

1. Karakter; ciri khas yang dimiliki seseorang
2. Kepribadian; cermin individu
3. Karakter suatu bangsa; Perilaku, nilai – nilai, dan pola pikir yang dimiliki oleh sekelompok manusia.

**Bela Negara**

* Pengertian

- Bela Negara adalah suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negaranya

- Sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara

* Landasan Hukum
* Landasan idiil: Pancasila
* Landasan konstitusional:

- Undang-undang No 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara

- Tap MPR No VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI

- UUD ‘45 pasal 27 ayat 3

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

- UUD ‘45 pasal 30 ayat 1

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”

* Unsur Bela Negara

1. Cinta Tanah Air
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara

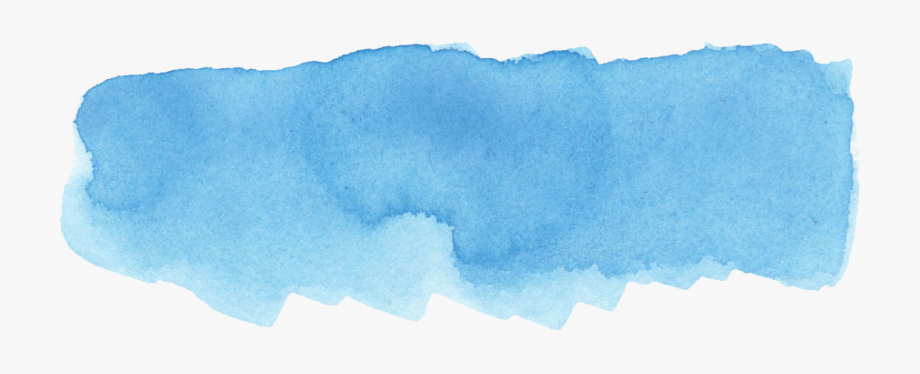
* Wujud Bela Negara menurut UU No. 3 tahun 2002

- Pendidikan Kewarganegaraan

- Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

- Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela

- Pengabdian sesuai profesi

**Negara Hukum dan HAM**

* Pengertian Negara Hukum
* Istilah negara hukum secara terminologis berasal dari kata rechtsstaat atau rule of law
* Pengertian negara hukum menggambarkan adanya penye- lenggaraan kekuasaan pemerin- tahan negara yang didasarkan atas hukum
* Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, terlindungi hak asasi manusia, dan kesejahteraan yang berkeadilan
* Di Indonesia konsep negara hukum dapat dibuktikan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV; Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945
* Dasar yuridis negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “negara Indonesia adalah negara hukum”
* Ciri Negara Hukum

1. HAM terjamin oleh undang-undang
2. Supremasi hukum
3. Pembagian kekuasaan (trias politika) demi kepastian hukum
4. Kesamaan kedudukan di depan hukum
5. Peradilan administrasi dalam perselisihan
6. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi
7. Pemilihan umum yang bebas
8. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

* Pilar-pilar utama untuk menyangga tegaknya satu Negara Hukum modern

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law):

Semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

1. Persamaan dalam Hukum

(Equality before the Law):

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan

1. Asas Legalitas

(Due Process of Law):

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan

Prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen:

kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary).

7. Peradilan Tata Usaha Negara:

Terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara

(Constitutional Court):

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

1. Bersifat Demokratis

(Democratische Rechtsstaat):

Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan

* Makna Indonesia sebagai Negara Hukum

- Negara Indonesia adalah negara hukum dinamis, atau negara kesejahteraan (*welfare state*), yg berimplikasi bahwa para penyelenggara negara menjalankan tugasnya dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif.

- Sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil

**Akomodatif** → sebagai pengayom, pelindung masyarakat

**Adaptif** → mampu menyesuaikan perkembangan jaman

**Progresif** → selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan.

* Negara hukum dan HAM

- Negara hukum dimanapun di dunia ini tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis.

- Keberadaan negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis.

- Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD 1945

* Pengertian HAM

Hak dasar yang melekat & dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME

Landasan pengakuan HAM:

- Kodrat manusia

- Tuhan menciptakan semua manusia sama, kecuali amalnya

* Penegakan HAM di Indonesia

1. Komisi Nasional HAM

[Keppres No 5/93 tgl 7 Juni 1993  UU No 39/1999 ttg HAM]

- Lembaga mandiri, kedudukan setingkat lembaga negara yg lain.

- Fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM.

- Tujuan:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif pelaksanaan HAM sesuai PS, UUD 45, Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM.
2. Meningkatkan perlindungan & penegakan HAM guna perkem- bangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya & kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehdupan.
3. Pengadilan HAM

[UU No 26/2000 ttg Pengadilan HAM]

- Pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum, berkedudukan di kabupaten/kota.

- Khususbertugas dan berwe- nangmemeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat (termasuk di luar batas teritorial RI oleh WNI).

1. Pengadilan HAM Ad Hoc

dibentuk atas usul DPR, dengan Keppres Peristiwa  Pelanggaran HAM berat sebelum terbit UU No. 26/2006

Pengadilan HAM Ad Hoc akan dibentuk ketika ada pelanggaran atau kejahatan HAM yang bersifat berat dan merugikan, serta peristiwa- peristiwa tertentu saja. Artinya, Pengadilan HAM Ad Hoc bersifat sementara hingga kasus atau peristiwa yang ditangani dianggap telah selesai diadili.

1. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

- Dibentuk berdasarkan UU

- Alternatif penyelesaian di luar Pengadilan HAM.

1. Lembaga Swadaya Masyarakat

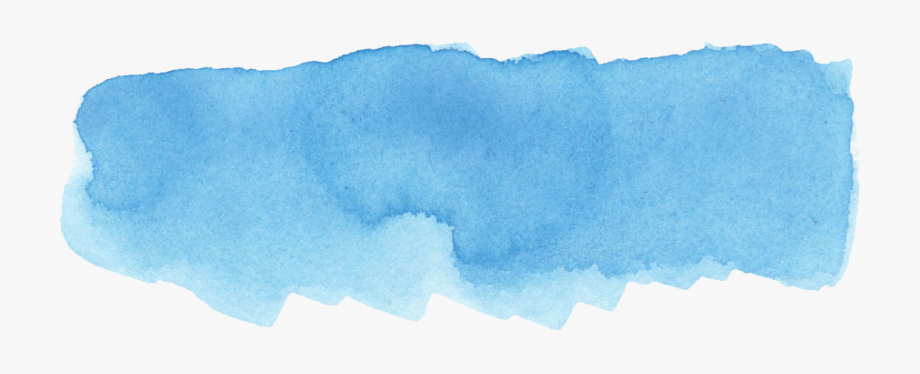
Contoh:

- KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan)

- YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia)

- ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)

- HRW (Human Right Watch)

**Geopolitik Indonesia**

* Pengertian Geopolitik

Sistem politik atau peraturan- peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh **aspirasi nasional geografik** (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu negara yg apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara (Kaelan, 2007 :122)

- Geopolitik Indonesia: Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan linkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya

* Faktor yang Memengaruhi Geopolitik Indonesia

1. Wilayah (Geografi)

* *Archipelago Principle*

- Archipelago berasal dari bahasa Italia : *archipelagos*

Archi → terpenting, terutama

Pelagos → laut, wilayah lautan

- Archipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya

- Asas archipelago mengandung pengertian pulau-pulau yang dikelilingi laut tersebut dalam kesatuan utuh dan unsur perariran atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebaga penghubung (John Crawford, 1820. The History of Indian archipelago )

* Bentuk Negara Berdasarkan Geografis

1. Negara Daratan (Land Lock Country)
2. Negara Berbatasan dengan laut

* Negara Pantai (Coastal archp.)
* Negara Pulau (Oceanic archp.)
* Negara Kepulauan (Archipelago)
* Konsepsi tentang Wilayah Kelautan
* Kepemilikan dan penggunaan wilayah laut

1. Res nullius

Laut tidak ada yg mempunyai

1. Res Cimmunis

Laut milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat dimiliki masing-masing negara

1. Mare Liberum

Wilayah laut bebas untuk semua bangsa

1. Mare Clausum (The Right and Dominion of The Sea)

Hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki negara sejauh dikuasai dari darat (3 mil)

1. Archipelagic State Principle (asas Negara Kepulauan)

Menjadi dasar dalam Konvensi PBB tentang hukum laut

* UNCLOS; United Nation Convention on the Law of the Sea

- **Negara kepulauan** adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

- **Laut teritorial**

Suatu wilayah laut yg lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dr garis pangkal (garis air surut terendah sepanjang pantai)

- **Perairan Pedalaman**

Wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dr garis pangkal.

- **Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE negara mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dari perairan

- **Landas Kontinen**

Landas kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jaraknya 200mil atau tidak melebihi 350 mil, batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m

* Karakteristik Wilayah Nusantara

- Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak antara benua Asia dan Australia, diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia

- Terdiri 17.508 pulau, yg sudah memiliki nama baru 6.044.

- Batas astronomi

6o LU - 11o LS ; 95o BT - 141o BT

- Jarak utara – selatan : 1.888 km

Jarak barat – timur : 5.110 km

Luas seluruhnya : 5.193.250 km2 (darat :2.027.087 km2 ; laut :3.166.163 km2 )

1. Geopolitik dan geostrategi

* Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi
* Pandangan Ratzel dna Kjellen

Mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme (mahkhluk hidup). Megara memerlukan ruang hidup (lebensraum), serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahan hidup, menyusut dan mati.

Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme (pemekaran wilayah) yang kemudian melahirkan ajaran adu kekuatan (power politic atau Theory of Power)

* Pandangan Haushofer

1. Suatu bangsa dalam mempertahan- kan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat menguasai dunia.
2. Kekuasaan imperium daratan kompak akan mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di lautan
3. Beberapa negara besar di dunia akan menguasai eropa, afrika, dan asia barat (jerman dan Italia)
4. Geopolitik adalah landasan hidup dan mendapat ruang hidupnya

* Geopolitik Indonesia

Geopolitik bangsa Indonesia yg didasarkan pada nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan seperti yg tertuang dlm pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia adalah bangsa yg cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan

Dalam hubungan Internasional bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan

1. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya

* Sejak 17/8/1945-13/12/1957

Wilayah Indonesia meliputi bekas Hindia belanda dengan ketentuan dalam “*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*“ tahun 1939 yang menyebutkan wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai surut dengan asas pulau-pulau terpisah

* Deklarasi Juanda

(13/12/1957 s.d. 17/2/1969)

- Asas kepulauan mengikuti yurisprudensi mahkamah inter- nasional pada tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan Inggris dan Norwegia. Dengan berdasarkan asas kepulauan maka wilayah Indonesia adalah satu kesatuan kepulauan nusantara termasuk perairan yg utuh dan bulat

- Berlaku juga “*point to point theory*” untuk menetapkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar

- Laut teritorial diukur 12 mil dari titik pulau terluar yg saling berhubungan

- Dokukuhkan dgn UU no.4/Prp/1969

Implikasinya wilayah teritorial Indonesia dari 2 juta km2 berubah menjadi 5 juta km2

* Deklarasi Landas Kontinen

(17/2/1969 s.d. sekarang)

- Merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan nusantara

- Konsekuensinya, semua sumber kekayaan alam didalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara RI

UU no. I taun 1973 tentag landas kontinen Indonesia

* Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

- PP negara tentang ZEE terjadi pada 21 Maret 1980

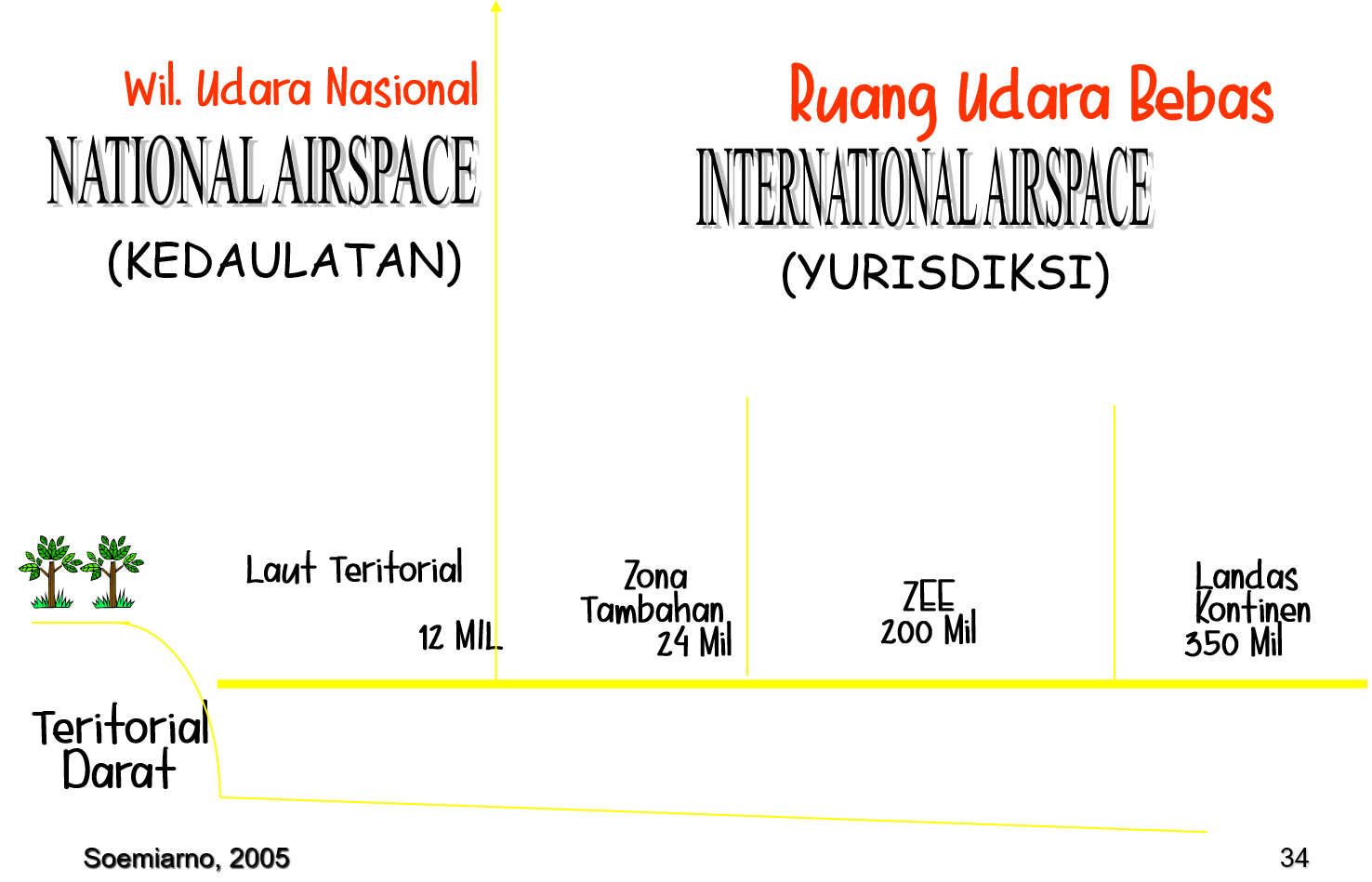
- Batas ZEE adalah selebar 200mil dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia

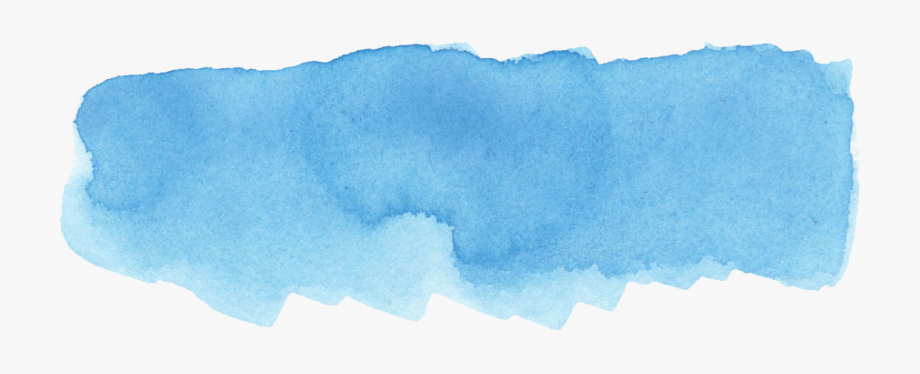
- Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30 April 1982 menerima UNCLOS yg ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia, konvensi tersebut menga- kui asas negara kepulauan serta me- nerapkan asas-asas pengukuran ZEE

- UU no.5 th 1983 ttg ZEE

- UU no.17 th. 1985 tentang ratifikasi UNCLOS

- Sejak 3 Februari 1986 Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yg telah meratifikasinya



**Geostrategi Indonesia**

* Pengertian

Suatu metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi melalui proses pembangunan nasional.

Karena tujuan itulah maka geostrategi dapat dijadikan pegangan atau bahkan doktrin pembangunan yang lazim disebut sebagai **ketahanan nasional** mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah Indonesia

* Landasan Fundamental

Pemukaan UUD 1945 alenia ke-3

“... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa …”

* Ketahanan Nasional

Kondisi dinamis suatu negara yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia ( Suradinata,2005:47)

Setiap bangsa harus memiliki suatu ketahanan nasional yang sesuai dengan kondisi dan pengalaman sejarah masing-masing. Bagi bangsa Indonesia ketahanan Nasional diba- ngun di atas dasar Pancasila

* Konsepsi Ketahanan Nasional

Latar belakang:

1. Kekuatan apa yang **ada** pada suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mepertahankan kelangsungan hidupnya
2. Kekuatan apa yang **harus dimiliki** oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mepertahankan kelangsungan hidupnya
3. Ketahanan atau **kemampuan bangsa untuk tetap jaya**, mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang didalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (Usman, 2003:5)

Konsep:

1. Ketahanan

Kekuatan yg membuat suatu bangsa dan negara dapat bertahan, kuat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

1. Ancaman

Usaha untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan atau keadaan secara konsepsional dari sudut kriminal maupun politis.

1. Gangguan

Kendala yang bertujuan melemahkan dan bersifat konseptual yang berasal dari luar

1. Hambatan

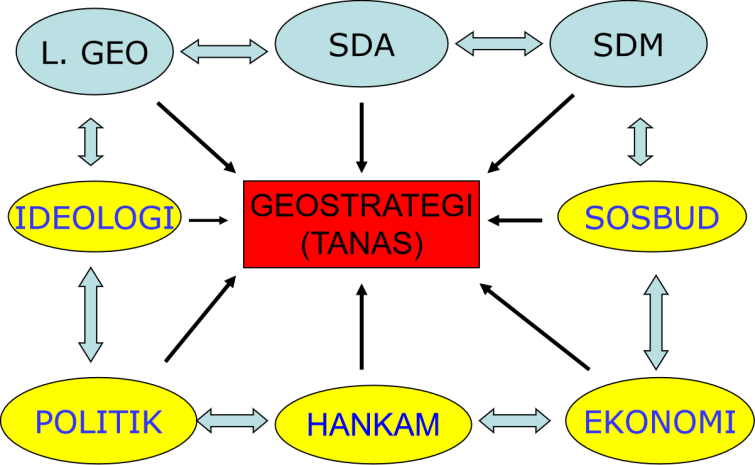
Gangguan yang berasal dari dalam

1. Tantangan

Usaha yang bersifat menggugah kemampuan

* Sifat Ketahanan Nasional

1. Integratif

Segenap aspek kehidupan kebangsaan dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, alam, dan suasana ke dalam saling mengadakan penyesuaian yang selaras dan serasi

1. Mawas ke dalam

Ketahanan nasional diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya.

1. Menciptakan kewibawaan

Memiliki *deterrent effect* (efek jera) yg harus diperhitungkan pihak lain

1. Berubah menurut waktu

Pada hakikatnya bersifat dinamis

* Aspek dalam Ketahanan Nasional

Aspek Alamiah [*Tri Gatra*]

1. Letak geografis negara
2. Keadaan dan kekayaan alam
3. Keadaan dan kemampuan penduduk

Aspek Kemasyarakatan [P*anca Gatra*]

1. Ideologi
2. Politik
3. Ekonomi
4. Sosial budaya
5. Pertahanan dan keamanan

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ +

***Asta Gatra***

Komponen dan hubungan asta gatra:

* Ketahanan Regional

- Pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 menjelaskan bangsa dan negara Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

- Diperlukan geopolitik dan geostrategi agar terjadi hubungan antar bangsa dalam membangun ketahanan regional

- Ketahanan regional merupakan saling kepercayaan dan

semangat kebersamaan sekawa- san sehingga dimungkinkan dapat terjadi sinergi kekuatan dan koordinasi dalam mengantisipasi tantangan yang dirasakan bersama.

- Dengan demikian, kawasan dapat selalu menye uaikan diri dengan lingkungan strategis, baik regional, internasional, maupun global.

* Wajah Ketahanan Nasional

**Sebagai Kondisi**

- kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi aspek kehidupan nasional

- kondisi berwujud suatu spektrum: daya kekebalan, tangkal, pukul

- kondisi wujud pembangunan nasional

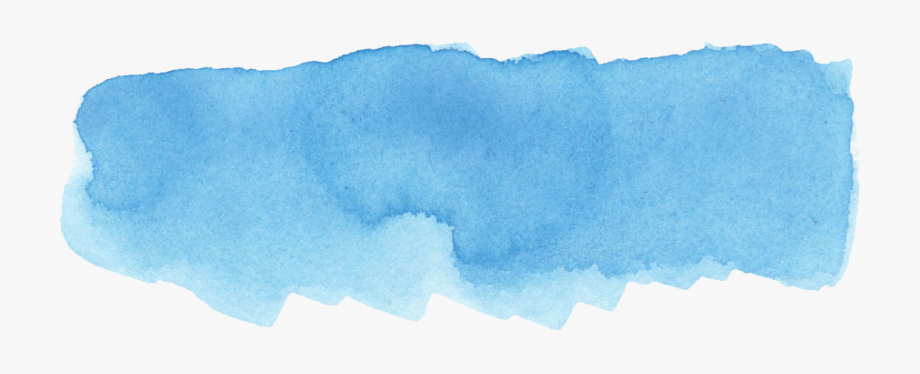
**Sebagai Doktrin**

Cara terbaik yang ada guna mengimplementasikan pengaturan dan penyelenggaraan kesejah- teraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dlm kehidupan nasional

**Sebagai Metode**

- untuk memecahkan masalah nasional, demi kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa

- metode ketahanan nasional adl astagrata yaitu metode integralistik, komprehensif atau kesisteman

**Integrasi Nasional**

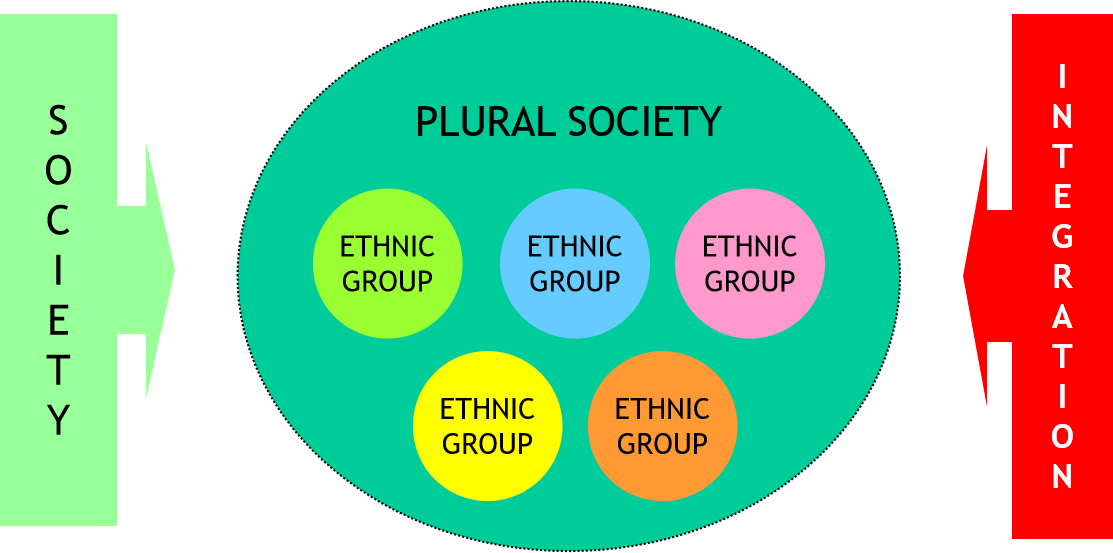
* Konsep Dasar

1. Definisi

Proses penyatu-paduan berbagai social groups ke dalam satu-kesatuan wilayah dan national identity.

1. Esensi

Tidak atau bukan menghilangkan diferensiasi, melainkan menjaga keseimbangan (harmoni).

1. Asumsi
2. Tujuan

Masyarakat yang lokalistik dan primordial melalui transformasi sosial dapat menyatu sebagai *nation* dan menjadi suatu identitas nasional

* Identitas Nasional

1. Definisi

Hal khusus, unik, yang menjadi kharakteristik dari suatu bangsa.

1. Dimensi

a. Dimensi Antropologis

b. Dimensi Religi/Religiositas

c. Dimensi Ideologis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_+

Pancasila

1. Fungsi

* Sebagai karakteristik dasar bangsa
* Alat perekat kebangsaan
* Simbol keunggulan bangsa
* Integrasi Nasional dan Negara Kebangsaan

- Integrasi Nasional merupakan

hal yang fundamental bagi

Nation-State.

- Karena

1. Merupakan dasar eksis- tensial Nation-State (khususnya NS model Ortodoks)

2. Merupakan faktor domi- nan dan determinan bagi kontinu- itas serta diskontinuitas eksistensi suatu Nation-State.

* Faktor-Faktor Integrasi Nasional

**Umum**

a. Faktor Primordial

b. Faktor Sakral (agama, dan/atau ideologi doktriner)

c. Faktor Tokoh / Pemimpin

d. Faktor Sejarah

e. Pilihan Strategi / Kebijakan

f. Faktor Perkembangan Ekonomi

g. Faktor Kelembagaan.

**Khusus; Indonesia**

1. Faktor Pelayaran dan Perdagangan
2. Faktor Agama Islam
3. B. Melayu sebagai *lingua franca*
4. Faktor Migrasi Penduduk.

* Strategi/Kebijakan Pembangunan dan Pembinaan Integrasi Nasional

**Teoritis** [Myron Weiner]

1. Asimilaition
2. Unity in Diversity

**Praksis** [Ramlan Subakti]

Campuran dengan aksentuasi yang berbeda-beda pada tiap situasi dan kondisi.